

TATA KELOLA ADMINISTRASI PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, C) DAN MUTU PEMBELAJARAN

Perawati Silalahi¹, Akhmad Suyatno², Lidia Aprileny Hutahaeen³

^{1,2}Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

³Universitas Negeri Manado, Minahasa, Indonesia

perawati.silalahi@lecturer.unpatti.ac.id

ABSTRACT

Non-formal and equivalence education (Paket A, B, C) often faces challenges in learning quality due to weak administrative governance, manual systems, and limited digital literacy among tutors. This study aims to synthesize the concepts and practices of good administrative governance and their contribution to improving community learning quality in equivalence education programs. A qualitative literature review was conducted using thematic analysis. Relevant journals and documents published between 2015 and the present were systematically selected and analyzed, focusing on educational administration, digitalization, managerial supervision, and community empowerment. The findings reveal four key themes: comprehensive administration system structuring, digitalization and technological literacy, managerial supervision supported by Standard Operating Procedures (SOPs), and active community collaboration. Adapting these principles is crucial for equivalence programs to enhance operational efficiency, institutional accountability, and ultimately, the quality of learning services. Implementing structured, digital, and participatory administrative governance serves as a strategic foundation for overcoming resource limitations and ensuring sustainable educational quality for diverse learners.

Keywords: Administrative Governance, Equivalence Education, Learning Quality, Qualitative Literature Review, Digitalization

ABSTRAK

Pendidikan nonformal dan kesetaraan (Paket A, B, C) sering menghadapi tantangan mutu pembelajaran akibat lemahnya tata kelola administrasi, sistem yang masih manual, dan rendahnya literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis konsep dan praktik tata kelola administrasi yang baik serta kontribusinya dalam meningkatkan mutu pembelajaran masyarakat pada program kesetaraan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan analisis tematik. Jurnal dan dokumen relevan yang terbit antara tahun 2015 hingga sekarang diseleksi dan dianalisis secara sistematis, dengan fokus pada administrasi pendidikan, digitalisasi, supervisi manajerial, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan penelitian mengungkap empat tema kunci: penataan sistem administrasi yang komprehensif, digitalisasi dan literasi teknologi, supervisi manajerial yang didukung Standar Operasional Prosedur (SOP), serta kolaborasi aktif masyarakat.

Mengadaptasi prinsip-prinsip ini sangat krusial bagi program kesetaraan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas kelembagaan, dan kualitas layanan pembelajaran. Penerapan tata kelola administrasi yang terstruktur, digital, dan partisipatif menjadi fondasi strategis dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan menjamin keberlanjutan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Tata Kelola Administrasi, Pendidikan Kesetaraan, Mutu Pembelajaran, Studi Pustaka Kualitatif, Digitalisasi

A. Pendahuluan

Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) memegang peranan strategis dalam menuntaskan wajib belajar dan memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. Namun, upaya peningkatan mutu pembelajaran dalam program ini sering kali menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya mutu layanan pendidikan kesetaraan tidak hanya disebabkan oleh faktor pedagogis, melainkan juga lemahnya tata kelola administrasi. Kondisi nyata yang sering dijumpai meliputi sistem administrasi yang masih manual, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola, rendahnya literasi digital tutor, serta dokumentasi program yang tidak tertib. Hal ini berimplikasi langsung pada lambatnya pelayanan terhadap peserta didik, ketidakakuratan data,

dan lemahnya akuntabilitas lembaga penyelenggara.

Secara teoretis, tata kelola administrasi yang terorganisir merupakan fondasi utama dan tolok ukur dalam meningkatkan mutu pendidikan. Huda (2022) menegaskan bahwa sistem administrasi pendidikan yang baik mencakup pengelolaan proses belajar mengajar, perencanaan evaluasi, manajemen kurikulum, ketenagaan, keuangan, layanan peserta didik, hingga hubungan dengan masyarakat. Senada dengan itu, Maulidin dan Lukitasari (2024) menemukan bahwa penerapan manajemen mutu yang sistematis berdampak signifikan terhadap efektivitas pendidikan dan kepuasan masyarakat. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks pendidikan nonformal sering kali terhambat oleh minimnya standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya supervisi manajerial. Yunus et al. (2025) mengidentifikasi bahwa

keterbatasan kompetensi supervisor dan tidak adanya SOP yang jelas menjadi tantangan utama yang menghambat terciptanya sistem dokumentasi yang tertib dan akuntabel.

Di sisi lain, transformasi digital dan pemberdayaan masyarakat menawarkan solusi potensial untuk mengatasi hambatan administrasi tersebut. Literatur mengenai tata kelola desa menunjukkan bahwa pelatihan berbasis teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi perkantoran, secara nyata meningkatkan efisiensi kerja, akurasi pengelolaan data, dan transparansi layanan (Mulyani et al., 2022; Ramdhan et al., 2025). Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui dukungan moral, material, dan kolaborasi lintas sektor terbukti mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, terutama dalam konteks wilayah yang memiliki sumber daya terbatas (Dewi & Suriansyah, 2025; Tirtaningrum et al., 2025). Model pengabdian terintegrasi yang menggabungkan literasi pendidikan, penataan administrasi, dan digitalisasi informasi juga telah terbukti memperkuat kapasitas kelembagaan

di tingkat komunitas (Kartika et al., 2026).

Meskipun urgensi tata kelola administrasi telah banyak dibahas, terdapat kesenjangan (*research gap*) yang nyata dalam literatur akademik. Mayoritas studi terdahulu berfokus pada konteks pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau tata kelola pemerintahan desa, sementara kajian yang secara spesifik mensintesis prinsip-prinsip tata kelola administrasi untuk diadaptasi ke dalam konteks unik Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) masih sangat terbatas. Padahal, program kesetaraan memiliki karakteristik khusus, seperti fleksibilitas waktu, heterogenitas peserta didik, dan ketergantungan tinggi pada tutor paruh waktu, yang menuntut model administrasi yang adaptif namun tetap terstandar.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana konsep dan praktik tata kelola administrasi yang baik dapat diadaptasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam program pendidikan kesetaraan. Tujuan dari penelitian kualitatif studi pustaka ini adalah untuk mendeskripsikan dan mensintesis tema-tema kunci tata

kelola administrasi—meliputi digitalisasi, supervisi manajerial, penyusunan SOP, dan partisipasi masyarakat—serta menjelaskan kontribusinya terhadap mutu layanan pendidikan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan rekomendasi praktis bagi penyelenggara pendidikan kesetaraan, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam merancang sistem administrasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan *literature review* (studi pustaka) yang disintesis melalui analisis tematik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memetakan lanskap penelitian, mengidentifikasi kesenjangan teoretis, dan menjembatani temuan penelitian dengan praktik kebijakan di lapangan secara rigor (Chong, Jun, & Chen, 2021). Berbeda dengan tinjauan pustaka tradisional yang bersifat naratif bebas, studi ini menerapkan prosedur yang terstruktur dan transparan untuk memastikan

koherensi, kontekstualisasi, dan generativitas temuan, sebagaimana prinsip utama dalam tinjauan literatur sistematis berkualitas tinggi (Cumming, Bettini, & Chow, 2023).

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang terindeks dalam repositori akademik terpercaya. Kriteria inklusi ditetapkan secara ketat untuk menjamin relevansi dan kemutakhiran data, yaitu: (1) dipublikasikan dalam rentang waktu 2015 hingga saat ini untuk memastikan relevansi dengan tantangan era digital; (2) berfokus pada konteks tata kelola administrasi pendidikan, tata kelola desa, supervisi manajerial, atau pemberdayaan masyarakat; dan (3) secara eksplisit membahas hubungan antara praktik administrasi/tata kelola dengan peningkatan mutu layanan atau kualitas pembelajaran. Studi yang tidak memiliki keterkaitan langsung antara variabel administrasi dan mutu, atau yang hanya berfokus pada aspek teknis tanpa dimensi manajerial, dikeluarkan dari analisis (kriteria eksklusi).

Prosedur pengumpulan dan seleksi data dilakukan melalui

beberapa tahapan sistematis. Pertama, identifikasi literatur dilakukan menggunakan kata kunci strategis seperti "tata kelola administrasi pendidikan", "mutu pembelajaran", "digitalisasi administrasi", "supervisi managing", dan "pendidikan kesetaraan" dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua, proses penyaringan (*screening*) dilakukan dengan membaca judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan kriteria inklusi. Literatur yang lolos penyaringan awal kemudian dibaca secara utuh (*full-text review*) untuk diekstraksi datanya. Proses ekstraksi difokuskan pada konteks penelitian, aspek tata kelola yang diteliti, serta temuan utama yang berkaitan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan mutu layanan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik kualitatif yang disederhanakan namun tetap rigor, sebagaimana dikembangkan oleh Purssell dan Gould (2021) untuk tinjauan kualitatif. Proses ini dimulai dengan *coding* (pengkodean) terbuka terhadap temuan-temuan dalam literatur yang terpilih, diikuti dengan pengelompokan kode-kode tersebut ke dalam kategori yang lebih luas.

Selanjutnya, kategori-kategori ini disintesis menjadi tema-tema utama (misalnya: digitalisasi sistem, penguatan SOP dan supervisi, serta partisipasi masyarakat). Tema-tema yang dihasilkan kemudian dikontekstualisasikan dan diadaptasi secara kritis untuk menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana prinsip-prinsip tata kelola administrasi yang baik tersebut dapat diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber literatur dan transparansi dalam melaporkan setiap tahapan seleksi serta analisis data.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Studi pustaka yang dilakukan terhadap berbagai literatur terkait tata kelola administrasi pendidikan, tata kelola desa, supervisi manajerial, dan pemberdayaan masyarakat telah mengidentifikasi empat tema utama yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu layanan dan pembelajaran. Sintesis dari literatur yang terpilih menunjukkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya

ditentukan oleh proses pedagogis di dalam kelas, tetapi juga sangat bergantung pada ekosistem administrasi dan manajerial yang mendukungnya. Temuan utama

mengenai tema-tema tata kelola administrasi dan kaitannya dengan mutu pembelajaran disajikan secara ringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Tema Utama Tata Kelola Administrasi dan Kontribusinya terhadap Mutu Pembelajaran

No	Tema Utama	Isi Singkat Temuan	Kaitan dengan Mutu Pembelajaran/Layanan	Sumber Literatur
1	Penataan Sistem Administrasi Pendidikan	Pengelolaan yang mencakup proses belajar mengajar, kurikulum, ketenagaan, keuangan, layanan siswa, dan hubungan masyarakat.	Menjadi tolok ukur mutu; menata sistem secara komprehensif meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan.	Huda (2022)
2	Digitalisasi dan Literasi Teknologi	Pelatihan aplikasi perkantoran, digitalisasi data, dan pengembangan sistem informasi untuk transparansi.	Meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, kecepatan layanan, dan transparansi informasi.	Mulyani et al. (2022); Ramdhan et al. (2025); Kartika et al. (2026)
3	Supervisi Manajerial, SOP, dan Literasi Hukum	Penyusunan SOP supervisi, pelatihan legalitas dokumen, standar surat-menyerat, dan sistem kearsipan.	Menciptakan dokumentasi yang tertib, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum serta standar layanan.	Yunus et al. (2025); Umam et al. (2026); Goraph & Sengi (2020)
4	Kolaborasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam bentuk dukungan moral, material, dan kolaborasi lintas sektor.	Meningkatkan motivasi belajar, relevansi program, dan keberlanjutan dukungan terhadap lembaga pendidikan.	Dewi & Suriansyah (2025); Tirtaningrum et al. (2025); Fadillah et al. (2025)

Berdasarkan Tabel 1, temuan studi pustaka dapat diuraikan ke dalam empat dimensi utama sebagai berikut:

Penataan Sistem Administrasi Pendidikan Yang Komprehensif

Literatur menunjukkan bahwa sistem administrasi yang terorganisir merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan mutu pendidikan. Huda (2022) menegaskan bahwa administrasi pendidikan yang baik harus mencakup sembilan aspek vital, mulai dari pengelolaan proses belajar mengajar, perencanaan evaluasi, manajemen kurikulum, hingga layanan peserta didik dan hubungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan kesetaraan, penataan sistem ini berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan bahwa fleksibilitas waktu belajar tidak mengorbankan standar kelengkapan dokumen akademik dan kualitas layanan terhadap peserta didik.

Digitalisasi Administrasi Dan Penguatan Literasi Teknologi

Transformasi dari sistem manual ke digital terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas layanan. Mulyani et al. (2022) dan Ramdhan et al. (2025) menemukan bahwa pelatihan berbasis teknologi informasi,

seperti penggunaan aplikasi perkantoran, mampu meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pengelolaan data secara drastis. Lebih lanjut, model pengabdian terintegrasi yang mencakup digitalisasi informasi dan pembuatan website lembaga terbukti memperkuat transparansi dan aksesibilitas informasi publik (Kartika et al., 2026). Adaptasi digitalisasi ini sangat krusial bagi penyelenggara Paket A, B, C untuk mengelola data peserta didik yang dinamis, heterogen, dan tersebar.

Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), Supervisi Manajerial, Dan Literasi Hukum

Aspek ini berkaitan erat dengan standarisasi dan akuntabilitas. Yunus et al. (2025) mengidentifikasi bahwa implementasi supervisi manajerial yang efektif, didukung oleh SOP yang sistematis dan terukur, mampu menciptakan sistem dokumentasi yang tertib dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Hal ini sejalan dengan temuan Umam et al. (2026) yang menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum aparatur melalui pelatihan legalitas dokumen dan kearsipan berdampak langsung pada ketertiban administrasi. Bagi

program kesetaraan, keberadaan SOP dan supervisi berkala akan menjamin keseragaman standar mutu antar-sanggar atau lembaga penyelenggara.

Kolaborasi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Mutu pendidikan kesetaraan sangat bergantung pada partisipasi ekosistem di sekitarnya. Dewi dan Suriansyah (2025) membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat, baik berupa dukungan moral maupun material, berdampak signifikan terhadap motivasi dan prestasi belajar. Tirtaningrum et al. (2025) menambahkan bahwa tata kelola kolaboratif antara lembaga pendidikan dan komunitas memerlukan komitmen bersama dan komunikasi yang transparan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan program Paket A, B, C untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan berkelanjutan dari masyarakat sekitar.

Sintesis dari tinjauan literatur secara konsisten menunjukkan bahwa tata kelola administrasi bukan sekadar fungsi birokratis pendukung, melainkan fondasi strategis yang

secara langsung berkorelasi dengan peningkatan mutu pembelajaran. Temuan ini memperkuat premis teoretis bahwa mutu pendidikan adalah hasil dari sistem manajemen yang terintegrasi, bukan hanya hasil dari proses pedagogis di dalam kelas. Dalam konteks pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang memiliki karakteristik unik—seperti fleksibilitas waktu, heterogenitas peserta didik, dan ketergantungan pada tutor paruh waktu—adaptasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi sangat krusial. Pembahasan ini akan menguraikan implikasi temuan berdasarkan tiga dimensi utama: digitalisasi sistem, standarisasi melalui supervisi, dan ekosistem kolaboratif.

Pertama, transformasi digital sebagai katalisator efisiensi dan akurasi data. Literatur menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi secara signifikan meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akurasi layanan (Mulyani et al., a real-time tracking system untuk kehadiran, modul pembelajaran, dan penilaian, yang selama ini sering kali terhambat oleh sistem manual. Model pengabdian terintegrasi yang berhasil meningkatkan literasi digital dan

penataan administrasi di tingkat dusun (Kartika et al., 2026) dapat diadopsi sebagai model pemberdayaan tutor dan penyelenggara program kesetaraan. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan perangkat keras, melainkan tentang membangun budaya kerja yang sistematis dan berbasis data.

Kedua, urgensi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan supervisi manajerial untuk menjamin akuntabilitas. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan nonformal adalah lemahnya standar mutu antar-lembaga penyelenggara. Temuan Yunus et al. (2025) mengonfirmasi bahwa ketiadaan SOP yang jelas dan keterbatasan kompetensi supervisor menjadi penghambat utama tata kelola. Dalam konteks Paket A, B, C, hal ini berisiko pada ketidakseragaman kualitas evaluasi dan sertifikasi. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan administrasi, sebagaimana dibuktikan oleh Umam et al. (to ensure that every learning activity, from enrollment to graduation, is documented, auditable, and meets national education standards.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat sebagai penopang keberlanjutan program. Pendidikan kesetaraan sering kali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Temuan Dewi dan Suriansyah (2025) serta Tirtaningrum et al. (2025) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat bukan hanya pelengkap, melainkan kebutuhan struktural. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk dukungan moral, penyediaan fasilitas belajar, atau pembentukan "komite belajar" dapat menjembatani kesenjangan sumber daya yang dialami lembaga penyelenggara. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa program pendidikan kesetaraan tetap relevan dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan legitimasi sosial yang kuat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan motivasi dan prestasi belajar peserta didik.

Berdasarkan sintesis di atas, implikasi praktis bagi pengelola Program Pendidikan Kesetaraan adalah perlunya pergeseran paradigma dari administrasi yang bersifat "penggugur kewajiban" menjadi administrasi yang "berorientasi mutu". Hal ini dapat diwujudkan melalui: (1)

penyederhanaan dan digitalisasi formulir administrasi peserta didik, (2) penyusunan SOP manajerial yang spesifik untuk sanggar kegiatan belajar, dan (3) pelibatan aktif komunitas lokal dalam monitoring program.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Sebagian besar literatur yang dianalisis berfokus pada konteks pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau tata kelola pemerintahan desa, bukan secara langsung pada lembaga pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, temuan dalam studi pustaka ini bersifat adaptif dan konseptual. Penelitian empiris lebih lanjut (seperti studi kasus atau *action research*) sangat diperlukan untuk menguji sejauh mana model tata kelola administrasi yang disintesis ini dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan dan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik Paket A, B, dan C.

D. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa tata kelola administrasi yang tertib, terdigitalisasi, dan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) serta

supervisi manajerial yang partisipatif merupakan fondasi strategis, bukan sekadar kewajiban birokratis, dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C). Untuk mengoptimalkan hal ini, penyelenggara program disarankan untuk segera mengadopsi sistem administrasi berbasis teknologi yang sederhana, memperkuat kapasitas tutor melalui pelatihan literasi digital dan administrasi, serta membangun kolaborasi aktif dengan komunitas lokal guna menutupi keterbatasan sumber daya. Mengingat keterbatasan studi pustaka ini yang masih bersifat adaptif dari konteks pendidikan formal dan tata kelola desa, penelitian lanjutan berupa studi kasus atau *action research* di lapangan sangat diperlukan untuk menguji efektivitas implementasi model tata kelola ini dan mengukur dampak langsungnya terhadap hasil belajar serta keberlanjutan program kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Chong, S. W., Jun, L., & Chen, Y. (2021). A methodological review of systematic literature reviews in higher education: Heterogeneity and homogeneity.

- Educational Research Review*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jn84b>
- Cumming, M. M., Bettini, E. F., & Chow, J. C. (2023). High-quality systematic literature reviews in special education: Promoting coherence, contextualization, generativity, and transparency. *Exceptional Children*, 89(3), 205–222.
<https://doi.org/10.1177/00144029221146576>
- Dewi, R. S., & Suriansyah, A. (2025). Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan: Studi kualitatif pada sekolah di pedesaan dan perkotaan. *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 5(1).
<https://doi.org/10.51878/elementary.v5i1.4158>
- Fadillah, Y., Suryani, E., & Rofieq, A. (2025). Tata kelola administrasi desa Karangmulya: Tantangan dan solusi di Kecamatan Bojongmangu. *An-Nizam*, 3(3).
<https://doi.org/10.33558/an-nizam.v3i3.10424>
- Goraph, F. A., & Sengi, E. (2020). Metode partisipatif dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pitu Maluku Utara. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2).
<https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1948>
- Huda, N. (2022). Sistem administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
<https://doi.org/10.37348/aksi.v1i1.197>
- Kartika, R. M., Ardiyanto, B., Krijthe, F. A., Khoirunnisa, H., Hapsari, I. C., Marlin, A. A., Nuryanti, A., Agustin, R., Azman, A. M., Mubaarok, D., & Muchran, M. (2026). Model pengabdian terintegrasi mahasiswa KKN dalam meningkatkan literasi pendidikan, tata kelola administrasi, dan digitalisasi informasi Dusun Waru, Samigaluh, Kulon Progo. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7(2).
<https://doi.org/10.54373/imeij.v7i2.5203>
- Maulidin, S., & Lukitasari, D. (2024). Manajemen mutu pendidikan dalam meningkatkan prestasi sekolah. *ACTION: Jurnal Inovasi Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah*, 4(3).
<https://doi.org/10.51878/action.v4i3.4268>
- Mulyani, N., Hutahaeen, J., Azhar, Z., Kartika, A., & Ambarwati, A. (2022). Coaching clinic: Digitalisasi tata kelola administrasi dan pelayanan masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4).
<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.8676>
- Purssell, E., & Gould, D. (2021). Undertaking qualitative reviews in nursing and education - A method of thematic analysis for students and clinicians. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 3.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2021.100036>
- Ramdhan, W., Santoso, S., Nofriadi, J., & Kartika, J. (2025). Pemberdayaan perangkat desa silo baru melalui pelatihan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 8(3).
<https://doi.org/10.33330/jurdimas.v8i3.3916>

- Tirtaningrum, R., Albab, U., & Dwijosusilo, K. (2025). Tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sidoarjo. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(6). <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1243>
- Umam, K., Taufik, A., & Kasanova, R. (2026). Penguatan literasi hukum aparatur desa dalam tata kelola administrasi desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal*, 3(1). <https://doi.org/10.62951/masyarakatmandiri.v3i1.2797>
- Yunus, M., & Imam, U. (2025). Tantangan implementasi supervisi manajerial dalam peningkatan tata kelola administrasi pendidikan. *J-Symbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 13(1). <https://doi.org/10.23960/symbol.v13i1.707>